

## The Role of The Social Services in Empowering Persons with Disabilities in Sikka District

Kristianus Emanuel<sup>1</sup>, Amir Djonu<sup>2</sup>, Muhammad Syahrin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Pendidikan Ekonomi  
IKIP Muhammadiyah Maumere, Indonesia

### ABSTRACT

This study aims to determine the extent of the role of the Social Service in Empowering Persons with Disabilities in Sikka District and what are the factors that hinder the Social Service in empowering persons with disabilities in Sikka District. This research method was carried out with a qualitative descriptive approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The informants involved in this study were at the Sikka District Social Service. Data collection techniques used are observation techniques, interviews and documentation. Data analysis techniques include data reduction (data reduction), data display (data presentation), conclusion drawing (verification). The results of the study show that the role of the Sikka Regency Social Service as a facilitator, motivator and dynamicator and the inhibiting factors are budget, human resources, land ownership status and promotional media. The tasks carried out by the tourism and culture service as well as the village government can be said to be quite effective and maximal enough in carrying out their duties by providing motivation, training and continuing to make improvements which will later bring about changes in the tourism sector

**Keyword:** Role, social services, empowerment and persons with disabilities

*Corresponding Author:*

**Kristianus Emanuel,**

Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Pendidikan  
Ekonomi IKIP Muhammadiyah Maumere, Indonesia

**E-mail:** [Kristianusemanuel983@gmail.com](mailto:Kristianusemanuel983@gmail.com)



### 1. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan bagian masyarakat Indonesia yang berhak memperoleh kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama untuk meraih dan memperoleh pendidikan untuk belajar, memiliki hak untuk kehidupan yang layak, dan kemampuan dalam berkarya, menghasilkan sebuah karya yang mempunyai nilai jual untuk dipasarkan. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, hal ini berlaku pula bagi kelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan fisik dan kelainan intelektual, yang tidak bisa berfungsi secara normal atau yang lebih dikenal dengan istilah penyandang disabilitas (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016).

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang sosial untuk pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka. Dinas sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas disuatu wilayah. Dinas Sosial merupakan tempat perlindungan bagi masyarakat sosial terutama bagi masyarakat penyandang disabilitas. Dinas Sosial juga berperan secara maksimal untuk memperbaiki taraf hidup penyandang disabilitas, dengan mendorong mereka dalam kegiatan yang mereka miliki agar mereka mempunyai bekal dalam hidupnya. Karena pada hakikatnya peran Dinas Sosial yaitu untuk menjalankan tugas pemerintah daerah secara maksimal terlebih khusus untuk masyarakat penyandang disabilitas.

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka terdapat 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) orang dan yang tercatat sekarang ada 11 (sebelas) orang yang meninggal. Status penyandang disabilitas yang dapat hidup mandiri secara sosial dan ekonomi, sehingga masih banyak penyandang disabilitas yang hanya meminta belas kasihan dari orang seperti pengemis di pertokoan atau pasar. Hal ini menjadi perhatian khusus dan menjadi tanggung jawab bersama antara pihak pemerintah melalui Dinas Sosial selaku

instansi yang menangani masalah penyandang disabilitas. Akan tetapi melihat pada zaman sekarang sejumlah masyarakat dalam lingkaran kemiskinan sebagai penyebab utama munculnya penyandang disabilitas yang dalam kehidupannya masih memerlukan bantuan dari pihak pemerintah agar kiranya dapat berkehidupan normal. Maka dari itu perlu kebijakan dan program untuk menunjang masyarakat agar sejahtera dari segi sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Sikka dalam menjalankan tugasnya selaku pelaksana di bidang sosial, dalam menjalankan tugasnya Dinas Sosial menjalankan fungsi pelaksanaan, usaha penyantunan, pembinaan, dalam rangka meningkatkan kemandirian serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dinas Sosial Kabupaten Sikka selaku instansi yang memang menangani masalah penyandang disabilitas yaitu dapat melakukan pemberdayaan bagi sesama penyandang disabilitas untuk memberikan pembinaan mental, dan pelatihan usaha serta bantuan sosial dalam bentuk usaha ekonomi produktif yaitu kegiatan kepada penyandang disabilitas dengan memberikan bantuan penguatan untuk sejenis modal usaha untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dan memberikan bantuan modal untuk pembelian alat-alat khusus yang dibutuhkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Pemberdayaan dari Dinas Sosial terhadap penyandang disabilitas salah satunya dengan cara mendayagunakan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki melalui pembinaan dan pelatihan yang intensif, sehingga mereka nantinya mempunyai bekal untuk hidup secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas merupakan suatu upaya untuk membantu meringkankan beban dalam mencapai kesejahteraan. Memberdayakan penyandang disabilitas dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat penyandang disabilitas yang berada dalam kondisi lemah atau proses memampukan dan memandirikan disabilitas itu sendiri dengan mengandalkan kemampuannya sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. (Kartasmita dalam Anwar, 2007:1)

Berdasarkan hasil observasi pra peneliti pada tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Sikka memberikan pelatihan atau fasilitasi kepada penyandang disabilitas sesuai dengan talenta atau bakat yang dimiliki, Dinas Sosial Kabupaten Sikka juga memberikan bantuan berupa logistik dan non-logistik di setiap akhir tahun. Akan tetapi masih ada juga sebagian para penyandang disabilitas yang mengemis di sepanjang pertokoan kota Maumere. Dinas Sosial selaku dinas yang Menanungi masalah sosial harus mampu berperan secara maksimal lagi bagi para penyandang disabilitas.

Pada realitanya saat ini penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan kesejahteraan mereka dan ada pula permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas antara lain kurangnya informasi tentang pentingnya rehabilitasi, kurangnya fasilitas umum pada bangunan umum atau bangunan pemerintah yang dapat memudahkan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan sehari-hari, dan kurangnya akses pekerjaan untuk penyandang disabilitas. serta ketersediaan fasilitas khusus seperti alat-alat kesehatan bagi penyandang disabilitas yang masih terbilang minim. Dalam hal ini pemerintah atau Dinas Sosial lebih memperhatikan pentingnya fasilitas-fasilitas umum bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.

## 2. METODE

Metode penelitian merupakan cara-cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai yang dikehendaki. Menurut Sugiyono (2017). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menentukan cara untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. teknik dan prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis Data yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, *Verification*.

## 3. PEMBAHASAN

### 1. Peran Dinas Sosial Kabupaten Sikka Terhadap Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Peran dinas sosial kabupaten sikka telah melakukan tugasnya di bagian pemberdayaan kepada penyandang disabilitas yaitu dengan melakukan pelatihan kepada penyandang disabilitas. Dinas Sosial Kabupaten Sikka juga terjun langsung ke kelurahan dan desa guna meninjau para penyandang disabilitas dimasing-masing kelurahan/ desa. Adapun tujuan kegiatan pelatihan kepada penyandang disabilitas yaitu untuk pemberdayaan kepada mereka, membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, mengurangi angka pengangguran kepada penyandang disabilitas guna mempersiapkan masa depan mereka agar lebih baik lagi. Selama satu minggu terakhir melakukan observasi di dinas sosial kabupaten sikka peneliti melihat bahwa sudah adanya peran penting Dinas Sosial Kabupaten Sikka. Untuk mengetahui lebih lanjut peran Dinas Sosial Kabupaten Sikka, peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan “sejauh ini bagaimana peran dinas sosial kabupaten sikka terhadap penyandang disabilitas” kepada salah satu kepala bagian Analisis Rehabilitasi

Masalah Sosial. Ada beberapa ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Marianus Gesi, S.Fil kepada peneliti sebagai berikut :

“Beliau memaparkan bahwa sejauh ini peran dinas sosial kabupaten Sikka terhadap penyandang disabilitas yaitu sudah dilaksanakan dengan cukup baik, adapun yang dilakukan dinas sosial kabupaten Sikka terhadap penyandang disabilitas sudah dilakukan, untuk sementara dinas sosial kabupaten Sikka berkoordinasi dengan pihak Desa atau Kelurahan untuk mendata penyandang disabilitas dimasing-masing Desa atau Kelurahan, akan tetapi kalau responnya kurang maka dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Sikka akan turun langsung untuk mendata. Penyandang disabilitas kabupaten Sikka yang sudah didata oleh dinas sosial kabupaten sikka sebanyak seribu sembilan ratus delapan puluh delapan orang dan yang tercacat sekarang ada sebelas orang yang meninggal. Untuk penanganan selama ini dengan keterbatasan dana pihak Dinas Sosial menjalin kerjasama dengan pihak ketiga seperti LSM ,(Lembaga Swadaya Masyarakat), kerjasama dengan pihak swasta seperti PELINDO, Pemerintah Desa ini yang berkaitan dengan data penyandang disabilitas, LKS yang berkaitan dengan penyandang disabilitas (Lembaga Kesejahteraan Sosial), ada juga kerjasama dengan yayasan-yayasan yang bergerak untuk menangani disabilitas seperti Sanres dan Caritas dari beberapa yang sudah melakukan kerjasama ini sudah memberikan beberapa intervensi berupa alat bantu seperti kursi roda, tongkat dan sembako. Untuk Fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sendiri saat ini belum ada karena keterbatasan dana. Pada bulan desember tahun 2022 pihak dinas sosial bersama dengan Bawaslu Kabupaten Sikka melakukan sosialisasi terkait demokrasi sebagai hak untuk memilih, bertempat di Hotel permata sari” (Wawancara, Bapak Marianus Gesi, S.Fil pada Hari Senin, 20 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sikka telah memberikan peran yang cukup efektif dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan dan turun langsung ke Desa dan Kelurahan guna mendata Penyandang disabilitas, pihak dinas sosial kabupaten Sikka juga menjalin kerjasama dengan pihak swasta seperti PELINDO, Pemerintah Desa, LKS dan yayasan-yayasan yang bergerak di bidang peyandang disabilitas beberapa yang sudah melakukan kerjasama ini sudah memberikan beberapa intervensi berupa alat bantu seperti kursi roda, tongkat dan sembako sudah memberikan intervensi berupa alat bantu seperti kursi roda, tongkat dan sembako untuk penyandang disabilitas, kegiatan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial yaitu untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik dan bisa bersaing di era global ini. Selanjutnya peneliti juga mewawancarai salah seorang anggota bidang Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial dengan pertanyaan “apakah ada pelatihan bagi penyandang disabilitas? Seperti apa pelatihan itu” ada beberapa ungkapan yang disampaikan oleh bapak Reginaldus Moat Wona, S.E kepada peneliti sebagai berikut:

“Beliau memaparkan bahwa untuk saat ini pihak Dinas Sosial Kabupaten Sikka memberikan kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan masa depannya yaitu untuk kegiatan pelatihan sendiri lebih banyak dengan kementerian dan balai centra efrata sudah beberapa kali dilakukan. Baru-baru ini ada kegiatan pelatihan di cafe Mai Sai PT. Langit Laut Biru terkait pengelolaan daun kelor menjadi teh pelatihan tersebut langsung dari kementerian, ada juga pelatihan sesuai dengan kemampuan dan bakat dari masing penyandang disabilitas untuk itu bakat dari menjahit sebanyak 50 orang yang ikut serta dalam pelatihan tersebut, perbengkelan sebanyak 48 orang, tukang kayu sebanyak 5 orang. Selain pelatihan yang diadakan oleh anggaran oleh kabupaten ada juga yang difasilitasi kegiatan yang dibiayai oleh kementerian sosial yang terkait dengan pelatihan tersebut, 50% dari mereka yang ikut kegiatan pelatihan dapat melanjutkan dirumah dengan berbasis komunitas yang dibiayai oleh pemerintah, ada juga peserta yang ikut pelatihan dikirim ke Makassar. Ditahun 2022 juga ada kegiatan pelatihan unit layanan disabilitas yang difasilitasi oleh BASARNAS terkait dengan penanganan untuk penyandang disabilitas saat bencana alam. Di Kabupaten Sikka sendiri sudah ada juga penjahit yang sekarang bekerja di pasar tingkat itu merupakan penjahit yang ikut pelatihan dari dinas sosial yang sekarang sudah bisa membuka usaha sendiri untuk masa depan yang lebih baik. Beliau juga mengatakan kalau untuk penyandang disabilitas sendiri harus diprioritaskan paling utama karena kondisi mereka dengan keterbatasan dan sebenarnya mereka mempunyai kelebihan yang tidak ada pada manusia normal. Dalam pemberdayaan penyandang disabilitas ada juga factor penghambatnya yaitu ada pada keluarga, kurangnya ketersediaan fasilitas, rasa minder dari penyandang disabilitas, diskriminasi, dan keterbatasan dana” (Wawancara, Bapak Reginaldus Moat Wona, S.E pada Hari Senin, 20 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sikka juga telah ikut berpartisipasi dalam menjalankan perannya dengan memberikan pelatihan. Kegiatan pelatihan tersebut yakni yang berkaitan dengan masa depannya yaitu untuk kegiatan pelatihan sendiri lebih banyak dengan kementerian dan balai centra efrata sudah beberapa kali dilakukan. kegiatan pelatihan di cafe mai sai terkait pengelolaan daun kelor menjadi teh pelatihan tersebut langsung dari kementerian, ada juga pelatihan sesuai dengan kemampuan dan bakat dari masing penyandang disabilitas untuk itu bakat dari menjahit sebanyak 50 orang yang ikut serta dalam pelatihan tersebut, perbengkelan sebanyak 48 orang, tukang kayu sebanyak 5 orang. Selain pelatihan yang diadakan oleh anggaran oleh kabupaten ada juga yang difasilitasi kegiatan yang dibiayai oleh kementerian sosial yang terkait dengan pelatihan tersebut, 50% dari mereka yang ikut kegiatan pelatihan dapat melanjutkan dirumah dengan berbasis komunitas yang dibiayai oleh pemerintah.

Di Kabupaten Sikka sendiri sudah ada juga penjahit yang sekarang bekerja di pasar tingkat itu merupakan penjahit yang ikut pelatihan dari dinas sosial yang sekarang sudah bisa membuka usaha sendiri untuk masa depan yang lebih baik. Peneliti lanjut mewawancarai salah seorang penyandang disabilitas (Daksa) di Desa Darat Gunung Kecamatan Talibura dengan pertanyaan “sejauh ini bagaimana peran dinas sosial Kabupaten Sikka kepada Bapak selaku penyandang disabilitas” ada beberapa ungkapan Bapak Bernadus Bola kepada peneliti sebagai berikut :

“Beliau mengatakan bahwa untuk saat ini peran dinas sosial bagi penyandang disabilitas sudah cukup efektif dengan terus mendampingi kami penyandang disabilitas, dengan terus memberikan motivasi, kegiatan pelatihan, memberikan alat bantu berupa kursi roda dan tongkat, adapun dari pihak dinas sosial memberikan sembako bagi kami yang keluarganya kurang mampu dalam hal ini untuk kelangsungan hidup bagi penyandang disabilitas. Untuk pertama kali tentunya rasa kurang percaya diri itu tentu ada tetapi dengan adanya motivasi dan kegiatan-kegiatan yang diberikan dinas sosial pelan-pelan kami mulai membuka diri. Tentunya dalam kelangsungan hidup pasti ada hambatan-hambatan bagi kami seperti keterbatasan gerak dan langkah karena faktor fisik, dan mulai berpikiran tidak ada masa depan bagi kami yang banyak memiliki keterbatasan **begini tetapi dari pihak dinas sosial menepis itu semua, pihak dinas sosial memberikan pelatihan kepada kami terus-menerus pelatihan yang saya sendiri dapatkan itu ada kegiatan pelatihan tukang kayu**” (Wawancara, Bapak Nodus pada Hari Rabu, 1 Maret 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sejauh ini apa yang dirasakan penyandang disabilitas yaitu sudah ada peran penting dari dinas sosial yang cukup efektif dengan berbagai cara terus membenahi dan terus memberikan motivasi, pendekatan dan kegiatan pelatihan dengan adanya kegiatan pelatihan ini para penyandang disabilitas dapat membuka usaha atau lapangan pekerjaan sendiri untuk masa depan yang lebih baik, dan hal ini tidak terhalang dengan keterbatasan yang mereka miliki.

## 2. Bentuk Pemberdayaan Dinas Sosial terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sikka

Bentuk pemberdayaan Dinas Sosial untuk mensejahterakan kaum yang lemah khususnya penyandang disabilitas sedikit banyak telah dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Baik itu melalui peminjaman modal, pembinaan, pendidikan inklusi, pengembangan karakter, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya untuk memberdayakan penyandang disabilitas agar dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Terkait dengan pembinaan terhadap penyandang disabilitas, pemerintah bertugas untuk memfasilitasi, yang dimaksud memfasilitasi adalah bentuk memberdayakan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Harapan adanya pembinaan dan dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait terhadap penyandang disabilitas ini hendaknya dapat terus dilakukan, agar kemandirian dan kesejahteraan dalam kehidupannya dapat terwujud kehidupan bermasyarakat dengan melalui partisipasi dari masyarakat yang bersangkutan agar tercipta kemampuan dan kekuasaan akan dirinya untuk aktif dan ikutan didalam kehidupan social melalui penguatan kapasitas diri dengan memanfaatkan kemampuan yang ada sehingga tercipta kemandirian.

Tentu saja kegiatan pemberdayaan dilakukan demi terwujudnya taraf hidup yang lebih baik. Pada dasarnya setiap orang memiliki kemampuan untuk merubah kehidupannya, dari yang belum mampu menjadi mampu, belum berdaya menjadi berdaya dan lain-lain. Semua hal tersebut akan terlaksana dengan baik apabila masyarakat yang diberdayakan turut berpartisipasi aktif untuk melakukan perubahan yang nyata dalam kehidupannya. Pemberdayaan dilandasi oleh keadilan yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan baik itu kemampuan fungsional, vokasional, pendidikan dan kemampuan sosialnya, rasa percaya diri serta kemandirian.

**Tabel 3.1 Rekap Data Penyandang Disabilitas**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Alok Timur	74	66	140
2	Kewapante	31	31	62
3	Alok Barat	19	26	45
4	Alok	14	11	25
5	Mego	27	17	44
6	Tanawawo	24	21	45
7	Waiblama	19	13	32
8	Kangae	58	51	109
9	Lela	59	64	123
10	Waigete	69	57	126

11	Nita	140	113	253
12	Koting	12	15	27
13	Talibura	51	35	86
14	Nelle	18	15	33
15	Paga	86	69	155
16	Bola	114	119	233
17	Doreng	61	54	115
18	Magepanda	64	60	124
19	Palue	42	77	119
20	Mapitara		1	1
21	Hewongkloang	52	38	90
<b>TOTAL</b>		1034	954	1988

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Sikka

Berdasarkan tabel diatas, rekapitulasi data dari Dinas Sosial Kabupaten Sikka pada tahun 2019 sampai 2022 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penyandang disabilitas setiap tahunnya. Hal ini sudah seharusnya perlu menjadi perhatian khusus dan menjadi tanggung jawab bersama antara pihak pemerintah yang dalam hal ini melalui Dinas Sosial selaku instansi yang memang menaungi masalah penyandang disabilitas, serta masyarakat diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat diminimalisir salah satunya melalui upaya pemberdayaan. Pemberdayaan dari Dinas Sosial terhadap penyandang disabilitas salah satunya dengan cara memberdayakan untuk dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki pembinaan dan pelatihan yang intensif, sehingga mereka nantinya mempunyai bekal untuk dapat hidup secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan peneliti dapat membahas beberapa hal yang berkaitan dengan peran Dinas Sosial Kabupaten Sikka bagi penyandang disabilitas.

### 1. Peran Dinas Sosial Kabupaten Sikka Terhadap Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Dinas Sosial Kabupaten Sikka mempunyai peran penting dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Untuk mengetahui peran penting Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Sikka, peneliti mengkaji dengan teori menurut Jim Iffe dan Frank Tesoriero (2014) yang akan dibahas sebagai berikut:

#### 1. Peran Fasilitatif

Terkait peran fasilitatif peneliti akan membahas tentang Peran Dinas Sosial dalam memfasilitasi segala kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas dalam rangka memperkuat potensi dan meningkatkan kesejahteraan serta menunjang kehidupan bermasyarakat yang mampu hidup mandiri. Serta bagaimana Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas untuk membangkitkan semangat atau memberi dorongan kepada penyandang disabilitas untuk menggunakan potensi dan sumber yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan usaha juga membangun kesepakatan dengan pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam rangka pengembangan potensi usaha dan pembinaan terhadap penyandang disabilitas. Sebagai fasilitator, Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memenuhi pelayanan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dinas sosial melaksanakan program pemberdayaan pembinaan penyandang disabilitas dalam bentuk usaha ekonomi produktif (UEP) berupa pemberian bantuan penguatan modal usaha, selain itu dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi disabilitas dinas sosial membangun kerja sama dengan dinas-dinas yang terkait, pihak swasta dan yayasan-yayasan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten Sikka dan pengusaha yang menjadi narasumber dalam pemberian motivasi dan dukungan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki dalam mengelola usaha.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti di lapangan Pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh dinas sosial sudah berjalan sesuai program, namun program pemberdayaan tersebut hanya sebatas pemberian paket bantuan sosial dan kegiatan pelatihan, dalam penyaluran dan pemberian bantuan sosial yang dilaksanakan dinas sosial belum merata kepada seluruh disabilitas dikota Kabupaten Sikka, hal ini dikarenakan dilihat dari bantuan yang diterima berulang kali untuk disabilitas yang sama. Dinas Sosial dalam memfasilitasi segala kebutuhan penyandang disabilitas masih terbilang minim hal ini dikarenakan dana yang masih sangat terbatas. Adapun dari dinas sosial memberikan bantuan berupa alat-alat kesehatan khusus berupa kursi roda, tongkat, sembako dan alat pendengar untuk disabilitas

#### 2. Peran Edukasi

Terkait peran adukasi peneliti membahas mengenai pemberian informasi yang dibutuhkan penyandang disabilitas, peningkatan pengetahuan, pelatihan bagi penyandang disabilitas dalam rangka membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas disabilitas. Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas memiliki peran penting dalam menangani penyandang disabilitas yang ada di

Kabupaten Sikka. Peran yang dimaksud disini yaitu kewajiban dan tanggung jawab dalam pemberian edukasi untuk menambah pengetahuan dalam peningkatan kemampuan fisik, mental spiritual, dan sosial agar para penyandang disabilitas siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Salah satu peran edukasi yang dilakukan Dinas Sosial dalam pemberdayaan disabilitas yaitu dengan menjalankan program Usaha Ekonomi Produktif yaitu kegiatan individu atau kelompok untuk pemberdayaan penyandang disabilitas dengan memberikan bantuan penguatan modal usaha dan kegiatan usaha ekonomi produktif untuk para penyandang disabilitas. Kegiatan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan Dinas Sosial Setiap Tahun dua kali kegiatan dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas Kabupaten Sikka untuk tahun 2021 dan 2022 jumlah peserta kegiatan sebanyak 113 orang penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Sikka. Kegiatan pelatihan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas tersebut berupa seminar pemberian informasi dan motivasi serta pembinaan mental dan bimbingan sosial, pelatihan-pelatihan dalam mengelola usaha sesuai dengan keterampilan dan potensi yang dimiliki untuk membantu meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas serta kelangsungan hidup dan kemandirian penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti di lapangan proses pelatihan dan pembinaan mental disabilitas diadakan selama tiga hari dan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi disabilitas dinas sosial bekerja sama dengan berbagai pihak yaitu pemerintah Kabupaten Sikka, pihak swasta seperti PELINDO, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), LKS yang berkaitan dengan penyandang disabilitas (Lembaga Kesejahteraan Sosial), ada juga kerjasama dengan yayasan-yayasan yang bergerak untuk menangani disabilitas seperti Sanres, Caritas, dan akademisi serta pengusaha sebagai narasumber dalam pemberian materi dan pelatihan-pelatihan mengelola bantuan UEP yang diterima berupa usaha menjahit, perbengkelan dan tukang kayu serta juga pembinaan mental berupa motivasi dan dukungan serta bimbingan sosial yaitu bimbingan kemasyarakatan, bimbingan spiritual dan bimbingan kedisiplinan, dalam pemberian edukasi dari dinas sosial untuk meningkatkan potensi disabilitas sudah berperan cukup baik tetapi belum maksimal hal ini dikarenakan setelah proses pembinaan dan pelatihan yang diberikan dalam bentuk bantuan usaha ekonomi produktif sudah tidak ada pemantauan atau bimbingan lanjut dalam pengembangan usaha yang diberikan dinas sosial, serta kurangnya dalam pemberian informasi berupa penyuluhan sosialisasi mencakup seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka terkait rekomendasi rehabilitasi sosial dan pemberdayaan pemberian bantuan sosial dan layanan kartu indonesia sehat bagi penyandang disabilitas yang kurang mampu.

### 3. Peran Teknis

Berkaitan dengan peran teknis, dalam hal ini dinas sosial mengikuti pelatihan dari kementerian sosial bagi ASN untuk peningkatan kualitas pelaksanaan verifikasi dan validasi data dalam mengelola dan menginput data di lapangan, serta kemampuan menggunakan komputer dalam melaksanakan tugas penginputan data jumlah penyandang disabilitas, melakukan pendataan anggaran dan pembuatan laporan hasil kegiatan serta kemampuan melakukan presentasi secara verbal maupun tertulis dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pembinaan pengembangan penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti di lapangan bahwa dinas sosial dalam proses pengumpulan data jumlah disabilitas, mengambil data dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), pekerja sosial, organisasi-organisasi sosial, karang taruna dan ada juga beberapa pegawai dinas sosial yang juga ikut serta turun lapangan dan verifikasi data di setiap kelurahan atau desa, untuk pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan disabilitas dalam bentuk pemberian paket bantuan UEP Dinas Sosial menggunakan basis data terpadu yang ada di tiap kelurahan atau Desa yaitu data disabilitas yang tergolong Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Peran dinas sosial dalam pengumpulan data disabilitas masih belum maksimal hal ini dikarenakan data jumlah keseluruhan disabilitas setiap tahun dari dinas sosial belum mempunyai data terbaru hal ini dapat berpengaruh dalam proses pemberdayaan secara merata untuk disabilitas di Kabupaten Sikka, data terakhir yang ada hanya basis data terpadu jumlah keseluruhan disabilitas dari tahun 2019.

## 2. Faktor-faktor yang menghambat Dinas Sosial Kabupaten Sikka dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Dalam pemberdayaan penyandang disabilitas Dinas Sosial mengalami faktor-faktor penghambat. Adapun faktor-faktor penghambat yang di sampaikan oleh bapak Marianus Gesi, S. Fil dan bapak Reginaldus Moat Wona, S.E yaitu:

### 1. Anggaran

Salah satu yang menjadi kendala mengapa pemberdayaan penyandang disabilitas belum berjalan maksimal adalah dana dimana anggaran dana termasuk dalam dana DAK (Dana Alokasi Khusus) yaitu dana yang didapatkan dari pusat. Dalam hal anggaran atau pendanaan juga berpengaruh terhadap proses pemberdayaan bagi penyandang disabilitas untuk kegiatan pelatihan.

Peneliti melihat bahwa anggaran juga merupakan salah satu faktor penghambat dimana untuk pemberdayaan bagi penyandang disabilitas membutuhkan dana. Dengan adanya dana sehingga mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang secara terus-menerus supaya dapat menunjang keberhasilan dari rencana yang di buat oleh Dinas Sosial Kabupaten Sikka.

#### 2. Keluarga

Dukungan dari keluarga yang masih dikatakan minim juga bisa menjadi faktor penghambat karena kurang percayanya keluarga kepada penyandang disabilitas yang memiliki banyak kemampuan. Mungkin dari pihak keluarga terlalu sayang kepada anak (penyandang disabilitas) dan tidak memberikan ruang kepada anak untuk sama-sama berproses bersama dinas sosial menata masa depan dan mempersiapkan hidup yang mandiri, disisi lain orang tua atau keluarga tidak pikir bahwa anak (penyandang disabilitas) mempunyai masa depan layaknya seperti orang normal.

#### 3. Fasilitas yang kurang memadai bagi penyandang disabilitas

Dinas sosial sejak tahun 2017 yang diharapkan adalah adanya rumah singgah atau rumah aman, tempat-tempat ibadah dan balai latihan bagi penyandang disabilitas belum terealisasikan. Disini contohnya seperti penanganan disabilitas mental Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dinas sosial merasa kesulitan untuk menyediakan tempat bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Dinas Sosial akan terus melakukan pembenahan-pembenahan sehingga dapat terealisasikan beberapa faktor penghambat yang terjadi saat ini.

### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memfasilitasi penyandang disabilitas disosial belum sepenuhnya maksimal melaksanakan tugas dilihat dari program pemberdayaan yang hanya sebatas pemberian paket bantuan sosial, dan dalam hal penyalurandan pemberian bantuan sosial yang dilaksanakan dinas sosial belum merata kepada seluruh disabilitas di Kabupaten Sikka.
2. Kurangnya penyuluhan sosialisasi dan informasi mengenai pemberdayaan mencakup semua penyandang disabilitas yang dilaksanakan dinas sosial dalam bentuk bantuan modal usaha UEP, serta kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana berupa Alat Bantu Kesehatan.
3. Dalam hal edukasi, dinas sosial hanya memberikan pelatihan dan pembinaan kepada penyandang disabilitas namun setelah proses pembinaan dan pelatihan yang diberikan dalam bentuk bantuan usaha ekonomi produktif sudah tidak adapemantauan atau bimbingan lanjut dalam pengembangan usaha yang diberikan dinas sosial.
4. Dalam proses pendataan jumlah penyandang disabilitas, dinas sosial hanya berpacu pada data yang lama, sehingga untuk penerima bantuan tiap tahun adalah mereka yang telah menerima bantuan sebelumnya.

### REFERENCES

- A.B Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, dan R&D, Bandung: Alfabeta, CV.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Balai Pustaka
- Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Volume 3 Nomor (3), 1-9
- Jim Ife dan Frank Tesoriero. 2008 *Community Development*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 11, Nomor 2, Juli 2018(86-102)
- Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No.2. Juli-Desember 2019
- Muslim Aziz. *Metodologi Pengembang Masyarakat*, Yogyakarta, Penerbit TERAS
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosialis pada pasal 14 Profil Dinas Sosial Kabupaten Sikka
- Rahayu, Sugi, Dewi, Utami, Ahdiana, Marita. 2013. *Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di Daerah Istimewah Yogyakarta*: Jurnal SOCIAH.
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Stategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, 2005 Bandung: PT. Revika Aditama
- Theresia Baturangka, J. E Kaawoan, Frans Singkoh. (2019). *Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Zubaedi. 2013 *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013